

## Peran, Tantangan dan Stratedi Pusat Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi Islam di Indonesia

<sup>1</sup>Sul Pratama Putra, <sup>2</sup>Moh. Juharis, <sup>3</sup>Muhammad Ramli, <sup>4</sup>Mardhiah

<sup>1,2,3,4</sup>Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

e-mail: [zulpratamaputra17@gmail.com](mailto:zulpratamaputra17@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to examine the role, challenges, and strategies of Quality Assurance Centers in Islamic Higher Education Institutions. Using a qualitative descriptive method, the research explores how internal and external quality assurance systems are implemented to improve educational standards. Data were analyzed through document studies and literature reviews relevant to the quality assurance framework in higher education. The findings show that Quality Assurance Centers play a strategic role in ensuring academic, managerial, and ethical standards in line with Islamic values. However, various challenges arise, such as limited human resources, lack of commitment, and misalignment of regulations. To overcome these obstacles, strategic efforts are required, including strengthening internal systems, promoting a culture of quality, leveraging information technology, and enhancing governance and collaboration among stakeholders. The study concludes that the success of quality assurance in Islamic universities depends on consistent implementation, strong leadership, and stakeholder involvement to ensure sustainable improvement in educational quality.*

**Kata Kunci:** *Quality Assurance, Islamic Higher Education, IQAS, EQAS, Quality Culture*

### PENDAHULUAN

Perguruan tinggi dituntut untuk senantiasa meningkatkan mutu pendidikannya melalui standar sumber daya manusia yang terus berkembang secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Pusat Penjaminan Mutu (PPM) berperan sebagai motor utama yang menjamin kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan perguruan tinggi Islam. Fungsi penjaminan mutu tidak hanya mengacu pada standar nasional, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam setiap aspek pendidikan agar menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik dan berkarakter Islami (Purwanto, 2020)

Peran strategis Pusat Penjaminan Mutu menjadi semakin signifikan di tengah dinamika globalisasi pendidikan tinggi dan tuntutan kualitas yang semakin kompleks. PPM tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan evaluasi dan monitoring kualitas internal, tetapi juga memastikan bahwa kurikulum, metode pengajaran, dan tata kelola institusi sejalan dengan visi keislaman yang inklusif dan rahmatan lil alamin. Integrasi antara sistem penjaminan mutu dengan nilai-nilai Islam bukan semata simbolis, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam membentuk lulusan yang memiliki kompetensi profesional dan integritas spiritual. Dalam hal ini, penjaminan mutu di PTKI harus dirancang secara sistematis dan transformatif untuk menumbuhkan

budaya mutu yang tidak hanya memenuhi indikator administratif, tetapi juga berdampak pada pembentukan insan kamil dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sistem penjaminan mutu dibagi menjadi dua: *Sistem Penjaminan Mutu Internal* (SPMI) dan *Sistem Penjaminan Mutu Eksternal* (SPME). Keduanya merupakan instrumen penting dalam kontrol kualitas lembaga pendidikan tinggi (Harahap, Gultom, & Nasution, 2023). Selain itu, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 menguatkan peran SPMI dan SPME sebagai landasan penerapan manajemen mutu yang berkelanjutan di perguruan tinggi. (R. N. Sari, 2024)

Kedua sistem ini saling melengkapi dalam memastikan mutu pendidikan tinggi terlaksana secara menyeluruh. SPMI berperan sebagai mekanisme internal yang membentuk budaya mutu melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, sedangkan SPME berfungsi sebagai alat validasi eksternal untuk menilai kepatuhan institusi terhadap standar nasional maupun internasional. Penerapan keduanya secara sinergis menjadi fondasi utama bagi akuntabilitas akademik, transparansi tata kelola, serta peningkatan daya saing perguruan tinggi dalam konteks global dan lokal.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga telah mengarahkan pelaksanaan penjaminan mutu dengan nilai-nilai spiritual dan etika Islam melalui pedoman integrasi ilmu di PTKI. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam membangun sistem pendidikan yang unggul sekaligus Islami (R. M. Sari & Amin, 2020). Namun, pelaksanaan penjaminan mutu tidak lepas dari tantangan serius. Terbatasnya sumber daya manusia, resistensi budaya terhadap perubahan, serta ketidaksesuaian regulasi menjadi hambatan dalam implementasi sistem mutu yang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kolaboratif dan sistematis yang dapat menjawab tantangan ini secara efektif. (Widyastuti, T., Nugroho, S., & Arifin, 2020)

Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural yang menghambat proses transformasi mutu secara menyeluruh di lingkungan perguruan tinggi. Kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kependidikan, lemahnya koordinasi antarunit penjaminan mutu, serta rendahnya komitmen dari pimpinan lembaga terhadap pentingnya evaluasi berkala menjadi faktor-faktor yang memperburuk keadaan. Untuk itu, penguatan kapasitas kelembagaan, sinergi lintas sektor, serta integrasi sistem mutu berbasis teknologi menjadi langkah krusial dalam membangun sistem penjaminan mutu yang adaptif dan berkelanjutan.

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen resmi, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penjaminan mutu di

perguruan tinggi Islam. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2025, dengan lokasi pelaksanaan fleksibel di lingkungan akademik penulis, termasuk pemanfaatan perpustakaan, repositori ilmiah, dan sumber daring terpercaya. Subjek dalam penelitian ini bukan berupa individu, melainkan dokumen dan literatur yang memiliki keterkaitan substansial dengan topik kajian. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa konsep, teori, prinsip, dan praktik penjaminan mutu pendidikan tinggi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah isi dengan menggunakan instrumen berupa catatan kutipan dan form sintesis literatur. Adapun prosedur penelitian dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan dan klasifikasi sumber literatur, analisis tematik atas isi literatur, hingga penarikan kesimpulan yang disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Manajemen Mutu**

Penjaminan mutu di perguruan tinggi bisa dibilang sebagai sistem yang dibuat untuk memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan benar-benar sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan, sekaligus terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara apa yang ingin dicapai oleh institusi pendidikan, mutu pengajaran yang diberikan, hasil belajar mahasiswa, dan juga kebutuhan dunia kerja serta masyarakat (Mardhiah, 2021). Karena dunia terus berubah, sistem penjaminan mutu ini pun harus bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta dinamika pasar kerja. Dengan begitu, lulusan yang dihasilkan bisa lebih siap bersaing di tingkat global. Di sisi lain, proses penjaminan mutu ini dilakukan secara terbuka, berkelanjutan, dan berbasis pada data, agar setiap aspek pendidikan bisa dievaluasi dan ditingkatkan secara sistematis.

Perguruan tinggi yang bermutu adalah institusi yang mampu merespons kebutuhan masyarakat secara nyata, berkontribusi dalam pembangunan sosial, membuka peluang kerja, serta menghasilkan lulusan yang berdampak positif bagi bangsa dan negara. Untuk mencapai kualitas tersebut, diperlukan dua hal mendasar: pertama, adanya perencanaan program yang disusun secara sistematis; dan kedua, komitmen yang kuat dalam mengelola institusi sesuai dengan arah visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan (Ramli, 2017). Dengan kombinasi keduanya, perguruan tinggi tidak hanya menjaga relevansinya, tetapi juga mampu tumbuh dan berkembang menjawab tantangan zaman.

Penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan upaya sistematis untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan, sekaligus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Penjaminan mutu ini tidak hanya menyentuh aspek pengajaran saja, tetapi juga mencakup berbagai elemen penting lainnya, seperti kurikulum, sarana dan prasarana, serta tata kelola lembaga secara menyeluruh (Wlandari & Maulidin, 2024). Purwanto juga menekankan

bahwa proses ini perlu dijalankan secara terstruktur dan berbasis pada data yang akurat agar mutu pendidikan yang dihasilkan benar-benar konsisten dan berkelanjutan. Dalam bukunya, ia juga menggarisbawahi pentingnya evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kualitas di perguruan tinggi (Abdurrahmansyah & Rismawati, 2022).

Tujuan utama penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah menciptakan pendidikan bermutu lewat pendekatan manajerial yang direncanakan dan dijalankan secara sistematis. Mulyasa menekankan bahwa peningkatan kualitas harus berjalan kontinyu (*continuous improvement*) dan melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari pengelola, dosen, mahasiswa, hingga sektor industri. Cara tersebut akan membuahkan lulusan yang siap bersaing di pasar kerja dan memberi dampak positif bagi kemajuan masyarakat (Ratnasari, Handayani, Putri, & Nurlaili, 2024).

Penjaminan mutu di pendidikan tinggi sebaiknya didasari prinsip-prinsip utama seperti keterlibatan semua pihak, perbaikan berkelanjutan, transparansi, akuntabilitas, dan keterpaduan sistem. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan penting agar standar yang ditetapkan relevan serta dapat diterima bersama. Perbaikan berkala dilakukan lewat evaluasi menyeluruh terhadap proses pendidikan dan penyusunan rencana perbaikan berdasarkan hasilnya (Marjuni, Nurwahidah, & Mardhiah, 2022). Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan mendukung akuntabilitas pengelola dalam upaya memenuhi standar. Semua elemen dari kurikulum hingga manajemen lembaga harus terintegrasi demi mewujudkan mutu pendidikan yang optimal.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan proses penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pendidikan berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sekaligus terus mengalami peningkatan. Dalam praktiknya, penjaminan mutu bertumpu pada beberapa prinsip utama.

Pertama, keterlibatan semua pihak. Penjaminan mutu tidak bisa berjalan sendiri tanpa partisipasi aktif dari seluruh elemen kampus, seperti pengelola, dosen, mahasiswa, hingga pihak industri. Keterlibatan ini menjadi penting agar standar yang diterapkan benar-benar relevan dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan dunia kerja (Sallis, 2014).

Kedua, perbaikan berkelanjutan. Evaluasi terhadap setiap aspek pendidikan perlu dilakukan secara rutin. Hasil evaluasi inilah yang menjadi dasar perencanaan perbaikan mutu secara konsisten, agar kualitas pendidikan selalu berada dalam kondisi yang ideal (Sallis, 2014).

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks mutu, kedua hal ini saling berkaitan. Transparansi dalam pelaksanaan pendidikan memungkinkan setiap proses dapat dipantau dengan baik, sementara akuntabilitas memastikan bahwa seluruh pelaku pendidikan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar mutu yang telah ditentukan (Direktorat Penjaminan Mutu, 2018).

Keempat, keterpaduan sistem. Penjaminan mutu menuntut adanya koordinasi yang kuat antar elemen seperti kurikulum, proses pembelajaran, manajemen kelembagaan, serta fasilitas

penunjang. Semuanya harus berjalan selaras demi mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas (Direktorat Penjaminan Mutu, 2018).

Di sisi lain, sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi terbagi menjadi dua jenis, yakni penjaminan mutu internal (SPMI) dan penjaminan mutu eksternal (SPME). Fokus SPMI adalah kegiatan penjaminan mutu yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu sendiri secara mandiri dan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Dalam pelaksanaannya, perguruan tinggi menyusun dokumen standar mutu berupa kebijakan, manual, dan formulir SPMI.

Menurut Hasan, penjaminan mutu internal mencakup evaluasi mandiri terhadap berbagai aspek seperti kurikulum, metode pembelajaran, fasilitas, dan layanan akademik. Selain itu, umpan balik dari dosen dan mahasiswa menjadi komponen penting untuk memastikan kesesuaian program pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia kerja (Hasan, 2016).

Selain penjaminan mutu internal yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi, terdapat pula penjaminan mutu eksternal yang melibatkan pihak independen di luar institusi. Di Indonesia, lembaga seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berperan penting dalam proses ini. Penjaminan mutu eksternal bertujuan untuk menilai apakah perguruan tinggi telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh otoritas nasional maupun internasional (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2020).

Menurut Irawan, proses ini umumnya dilakukan melalui mekanisme akreditasi, yang menjadi bentuk evaluasi objektif terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Akreditasi bukan hanya memberikan pengakuan formal terhadap kualitas suatu institusi, tetapi juga berdampak besar terhadap reputasi dan kepercayaan publik, termasuk dunia kerja (Irawan, 2019).

Lebih jauh, penjaminan mutu eksternal juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi pendidikan kepada para pemangku kepentingan (Direktorat Penjaminan Mutu, 2018). Sementara penjaminan mutu internal fokus pada proses perbaikan dan pengembangan dari dalam, penjaminan mutu eksternal memberikan validasi atas pencapaian mutu tersebut (Sallis, 2014). Kedua pendekatan ini saling melengkapi: yang satu mendorong peningkatan berkelanjutan, dan yang lainnya memberikan pengakuan atas capaian yang telah diraih.

### **Peran dan Fungsi Pusat Penjaminan Mutu**

Pusat Penjaminan Mutu (PPM) merupakan salah satu unsur strategis dalam struktur kelembagaan perguruan tinggi yang berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. PPM memiliki tanggung jawab utama dalam merancang, melaksanakan, serta mengawasi sistem penjaminan mutu internal yang mencakup berbagai aspek penting dalam proses pendidikan, seperti kurikulum, metode pembelajaran, dan penyediaan fasilitas pendukung (Sola, Amriyah, Musdalifah, & Sudarman, 2022).

Melalui pendekatan sistematis dan terintegrasi, PPM memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh institusi. Selain itu, PPM juga melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja dosen, mahasiswa, dan sistem akademik secara keseluruhan. Evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan yang bersifat progresif dan berkelanjutan (Rismawati, Ibrahim, & Arifudin, 2024).

Tak hanya pada tataran internal, PPM juga memainkan peran penting dalam memastikan perguruan tinggi mampu memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh lembaga eksternal, seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Dalam konteks ini, PPM bertanggung jawab menyiapkan seluruh dokumen pendukung dan data yang valid untuk keperluan akreditasi, serta bertindak sebagai penghubung antara institusi dan lembaga penjaminan mutu eksternal (Zakiyatul, Anugerah, & Karwanto, 2024).

Lebih jauh, PPM turut memberikan masukan strategis berupa rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi eksternal, guna meningkatkan reputasi institusi serta menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan (Aris, 2010). Dengan demikian, peran PPM sangat signifikan dalam membangun budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi, yang pada akhirnya mendukung pencapaian visi institusi, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan daya saing secara nasional maupun global (Komara & Suhendraya, 2024).

### **Tantangan dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu**

Penjaminan mutu adalah proses sistematis untuk memastikan produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang tinggi dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Meskipun menjadi elemen penting dalam berbagai konteks pendidikan, industri, atau organisasi implementasinya sering menghadapi sejumlah tantangan multidimensional, termasuk aspek teknis, manusia, organisasi, serta regulasi.

Lembaga pendidikan yang baik secara konsisten berupaya memperbaiki kekurangan melalui inovasi. Inovasi ini mendorong perbaikan mutu secara berkelanjutan, terutama di perguruan tinggi. Namun, lima tantangan utama sering muncul:

1. Keterbatasan sumber daya

Tidak semua perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang penjaminan mutu. Pelaksanaan penjaminan mutu membutuhkan alokasi anggaran yang memadai, yang sering kali menjadi kendala di perguruan tinggi dengan keterbatasan finansial serta kurangnya infrastruktur teknologi untuk mendukung proses pengumpulan data, monitoring, dan evaluasi (Efendi, Asha, & Wanto, 2024)

Keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi menjadi hambatan signifikan. Penelitian oleh Widyastuti mengungkapkan bahwa institusi yang memiliki sumber daya terbatas cenderung menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu secara menyeluruh (F. Sari & Atikah, 2024). Hal ini mencakup kurangnya pelatihan bagi staf, infrastruktur yang tidak memadai, serta keterbatasan dana untuk mendukung program-program peningkatan kualitas.

## 2. Kurangnya pemahaman dan komitmen

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan komitmen dari para pemangku kepentingan. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan seluruh pihak, mulai dari manajemen puncak hingga staf operasional, sangat penting dalam keberhasilan penjaminan mutu. Ketidaktahuan terhadap pentingnya penjaminan mutu sering kali menyebabkan resistensi terhadap perubahan, sehingga implementasi sistem tidak berjalan optimal (Rahman et al., 2025).

## 3. Budaya organisasi yang kurang mendukung

Budaya organisasi yang tidak mendukung kualitas menjadi tantangan berikutnya. Beberapa organisasi cenderung mempertahankan cara kerja lama yang kurang efektif, sehingga sulit beradaptasi dengan paradigma penjaminan mutu. Menurut Sari perubahan budaya organisasi membutuhkan waktu dan strategi komunikasi yang efektif agar seluruh anggota organisasi dapat memahami pentingnya kualitas (F. Sari & Atikah, 2024).

## 4. Ketidaksesuaian kebijakan dan regulasi

Kebijakan dan regulasi yang tidak sinkron antara tingkat lokal, nasional, dan internasional sering menjadi kendala dalam pelaksanaan penjaminan mutu. Hal ini menciptakan kebingungan dalam implementasi dan mempersulit institusi untuk mencapai standar yang diharapkan (Rahman et al., 2025).

## 5. Evaluasi dan monitoring yang kurang efektif

Evaluasi dan monitoring yang tidak dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan juga menjadi hambatan besar. Studi oleh Hasanah menunjukkan bahwa banyak institusi yang hanya melakukan evaluasi secara formalitas tanpa menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Akibatnya, perbaikan berkelanjutan tidak dapat dicapai (Nirmayanthi, Abdalla, Hasan, & Syamsudduha, 2024).

Lembaga pendidikan yang berkualitas senantiasa berupaya melakukan perbaikan terhadap berbagai kekurangan yang ada, salah satunya melalui inovasi yang berkesinambungan. Inovasi ini menjadi kunci dalam mendorong peningkatan mutu, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Penjaminan mutu yang efektif harus dilaksanakan secara sistematis dan mengacu pada prinsip serta ketentuan yang telah disepakati bersama.

Proses penjaminan mutu umumnya terdiri dari beberapa tahapan yang dirancang untuk merespons persoalan-persoalan yang sering dihadapi oleh perguruan tinggi. Agar mutu yang diharapkan dapat tercapai, perguruan tinggi perlu menjalankan sistem penjaminan mutu secara internal maupun eksternal sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, penting untuk melaksanakan proses monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan melalui tahapan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), agar pelaksanaan penjaminan mutu tetap sejalan dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan institusi.

### **Strategi Peningkatan Penjaminan Mutu**

Penjaminan mutu merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan bertujuan menghasilkan, mempertahankan, dan meningkatkan mutu institusi hingga diakui masyarakat. Di konteks perguruan tinggi, mekanisme ini digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan akademik, kualitas lulusan, serta memperkuat daya saing nasional dan internasional.

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, penjaminan mutu diarahkan untuk meningkatkan kualitas lulusan, relevansi program studi, dan efisiensi tata kelola (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2021).

#### **1. Peningkatan Tata Kelola Institusi**

Tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan fondasi bagi implementasi penjaminan mutu yang efektif. Perguruan tinggi harus memastikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi dalam pengelolaan institusi (Mukri, Yosmardi, Jamrizal, & Ansori, 2024).

#### **2. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Penjaminan Mutu Internal harus didukung oleh kebijakan yang jelas, struktur organisasi yang kompeten, serta dokumentasi yang sistematis (Salsabila & Faslah, 2025). Perguruan tinggi juga perlu mengembangkan sistem evaluasi diri untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan institusi.

#### **3. Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Dosen dan tenaga kependidikan memegang peran sentral dalam proses penjaminan mutu. Program pelatihan, workshop, dan studi lanjut dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam mendukung implementasi standar mutu (Nugroho, 2023).

#### **4. Pengembangan Teknologi Informasi dan Digitalisasi**

Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran, administrasi, dan pelaporan mutu menjadi kebutuhan mendesak. Sistem manajemen mutu berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses penjaminan mutu (Syaefulloh, Didik Himmawan, Sofyan Sauri, & Ujang Cepi Barlian, 2023).



### 5. Budaya Mutu (*Quality Culture*)

Penanaman budaya mutu di seluruh elemen perguruan tinggi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan proses penjaminan mutu. Budaya mutu dapat dibangun melalui pelibatan seluruh civitas akademika dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mutu. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2024)

Peningkatan penjaminan mutu di perguruan tinggi memerlukan pendekatan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan tata kelola yang baik, penguatan sistem internal, peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi, kerjasama eksternal, dan pengembangan budaya mutu, perguruan tinggi dapat mencapai standar mutu yang tinggi dan relevansi global.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk memperoleh mutu yang baik, maka Perguruan Tinggi harus menjalankan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Lembaga Pendidikan yang baik akan terus berupaya dalam memperbaiki hal-hal yang masih kurang dengan berinovasi meningkatkan mutu lembaganya. Penjaminan mutu yang baik harus dilakukan secara sistematis dengan pelaksanaan yang sesuai dengan aturan atau kaidah yang telah disepakati. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan dalam penjaminan mutu, agar tetap mengarah pada tujuan yang sudah ditetapkan.

Penulis berharap bahwa artikel ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan pembaca, khususnya dalam bidang yang dibahas. Artikel ini juga diharapkan dapat menjadi referensi awal yang bermanfaat bagi penelitian atau penulisan ilmiah selanjutnya. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga masukan dan kritik yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmansyah, A., & Rismawati, I. (2022). Peningkatan kualitas Perguruan Tinggi melalui Sistem Penjamin Mutu dengan Pendekatan Total Quality Managemen. *Jurnal Perspektif*, 6(2), 154. <https://doi.org/10.15575/jp.v6i2.177>
- Aris. (2010). *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. Retrieved from [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2020). *Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0*. Jakarta: BAN-PT.

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2021). *Pelaporan Sistem Penjaminan Mutu Internal*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2024). *Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik*. Jakarta.
- Direktorat Penjaminan Mutu. (2018). *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi* (p. 15). p. 15. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Efendi, M., Asha, L., & Wanto, D. (2024). Mengurai Tantangan Manajemen Mutu Pendidikan Madrasah: Tinjauan Dari Input-Proses-Output. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(2), 240–254. <https://doi.org/10.24252/edu.v3i2.43721>
- Harahap, M. S., Gultom, S., & Nasution, N. F. (2023). Kajian implementasi spmi (sistem penjaminan mutu internal) sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 11(1), 447–480.
- Hasan. (2016). *Manajemen Pendidikan: Strategi dan Aplikasi dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan, R. (2019). *Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Komara, E., & Suhendraya, H. (2024). *Pengambilan Keputusan dan Analisis Kebijakan Sektor Pendidikan*. Jawa Barat: Penerbit Filomedia Pustaka.
- Mardhiah, M. (2021). Pengaruh Tanggung Jawab Profesi, Komitmen Mengajar, Motivasi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Efektivitas Kinerja Guru. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 83. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v5i1.21156>
- Marjuni, Nurwahidah, & Mardhiah. (2022). Tingkat Pelaksanaan Manajemen Perkantoran Dan Kinerja Tenaga Administrasi Di MTS Madani Kab. Gowa. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 115–122. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v6i1.27487>
- Mukri, A., Yosmardi, H., Jamrizal, & Ansori. (2024). Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ta*, 8(2), 31327–31333.
- Nirmayanthi, A., Abdalla, M. A. F., Hasan, M., & Syamsudduha, S. (2024). Implementasi Manajemen Strategik Berbasis Sekolah. *Cognoscere: Jurnal Komunikasi Dan Media Pendidikan*, 2(3), 1–10. <https://doi.org/10.61292/cognoscere.214>
- Nugroho, K. S. (2023). Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Di Era Disrupsi Pendidikan Tinggi Melalui Digitalisasi Akreditasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(2), 176–184. <https://doi.org/10.33366/jisip.v12i2.2607>
- Purwanto, A. (2020). *Penjaminan Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahman, A. S., Ramli, R., Syamsuriah, Suherni, Jupri, & Mulias, I. (2025). Peran Strategis Jaminan Mutu dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Sultra Education Jurnal*, 5(1).
- Ramli, M. (2017). *Manajemen Strategik Sektor Publik*. Makassar: Alauddin University Press.

- Ratnasari, W., Handayani, L., Putri, A. P., & Nurlaili. (2024). Analisis Pembiayaan dan Manajemen Finansial di Perguruan Tinggi Swasta. *IMPIAN: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 249–258.
- Rismawati, R., Ibrahim, T., & Arifudin, O. (2024). Peran sistem informasi dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. *Jurnal Tahsinia*, 5(7), 1099–1122.
- Sallis, E. (2014). *Total Quality Management in Education* (Ke-3). London: Routledge.
- Salsabila, A. Z., & Faslah, R. (2025). Strategi Pengendalian Mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8(6), 6771–6775.
- Sari, F., & Atikah, C. (2024). Implementasi Supervisi Guru Sekolah Dasar Sebagai Kunci Penjaminan Mutu Pendidikan. *PENDAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(4), 37–48.
- Sari, R. M., & Amin, M. (2020). Implementasi Integrasi Ilmu Interdisipliner dan Multidisipliner: Studi Kasus di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2, 245–252.
- Sari, R. N. (2024). Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. *LLDIKTI Wilayah XIII Aceh*. Accessed: Oct, 25.
- Sola, E., Amriyah, B. I., Musdalifah, & Sudarman, A. (2022). Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Mpi Kelas B. *Educational Leadership*, 2(1), 48–61.
- Syaefulloh, Didik Himmawan, Sofyan Sauri, & Ujang Cepi Barlian. (2023). Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Melalui Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. *Manajia: Journal of Education and Management*, 1(1), 9–19. <https://doi.org/10.58355/manajia.v1i1.2>
- Widyastuti, T., Nugroho, S., & Arifin, M. (2020). Keterbatasan Sumber Daya Dalam Penjaminan Mutu. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4, 210.
- Wlandari, S., & Maulidin, S. (2024). Manajemen Penjaminan Mutu Terhadap Proses Pembelajaran: Studi di SMK N 2 Kendal. *Vocational: Jurnal Inovasi Pendidikan Kejurua*, 4(4), 1–23.
- Zakiyatul, A. M., Anugerah, I. U., & Karwanto. (2024). Pengembangan Kualitas Pendidikan Melalui Program Guru Penggerak. *Jurnal Idaarah*, 8(2), 154–169.